

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SERAPAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA PALOPO)

Marlina Makmur¹, A. Dahri Adi Patra², Altri Wahida³

*Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo
Jalan Jendral Sudirman Km.03 Binturu, Wara Selatan, Kota Palopo
Sulawesi Selatan 91922
marlinamakmur71@gmail.com*

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of budget planning, budget execution, procurement of goods/services, and management commitment to the budget absorption of Regional Apparatus Organizations (Study of the Palopo City Government). The population of this research is the regional Apparatus Organizations (OPD) of Palopo City. At the same time, the sampling technique used purposive sampling. The sample in this study was 3 OPD, namely the Social Service, Regional Revenue Agency (BAPENDA), and the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in the Palopo City Government. The method used in data collection is using primary data in the form of a questionnaire using a likert scale and secondary data in a budget realization report (LRA). Data analysis used multiple linear regression analysis, tested using statistical packages for social science (SPSS). The results showed that budget planning had a positive effect on budget absorption, budget execution had a positive impact on budget absorption, procurement of goods/service had a positive effect on budget absorption, and management commitment had a negative effect on budget absorption.

Keywords: Budget Planning, Budget Execution, Procurement of Goods/Services, Management Commitment, Budget Absorption of Regional Apparatus Organizations.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan komitmen manajemen terhadap serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palopo). Populasi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palopo. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini ada 3 OPD yaitu Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) di Pemerintah Kota Palopo. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu menggunakan data primer berupa kuesioner dengan menggunakan skala

likert dan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran (LRA). Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda yang di uji menggunakan *Statistical Packages For Social Sciene* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap serapan anggaran, pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap serapan anggaran, pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap serapan anggaran dan komitmen manajemen berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran.

Kata Kunci: Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Komitmen Manajemen, Serapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Yasonna H. Laoly, 2019). Dimana penyerapan anggaran termasuk indikator dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah. Hal ini dikarenakan melalui tingkat penyerapan anggaran, dapat diketahui gambaran mengenai kinerja/kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan (Mardiasmo, 2009).

Penyerapan anggaran yang baik dapat dilihat dari tingkat pelaksanaan realisasi fisik dan realisasi anggaran yang terjadwal sesuai dengan rencana

kerja selama satu periode tahun anggaran (Oktaliza et al., 2020). Namun hampir semua daerah di Indonesia mengalami tingkat penyerapan anggaran yang rendah, dan fenomena ini terus hingga saat ini terjadi setiap tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani (2020) kembali menyoroti kinerja serapan anggaran pemerintah daerah yang lambat. Dari total belanja APBD yang sebesar Rp 1.080,7 triliun, hingga akhir tahun oktober baru terealisasi Rp 678 triliun. Sehingga masih ada lebih dari Rp 400 triliun sendiri yang akan dieksekusi pada bulan November dan Desember. Fenomena rendahnya tingkat serapan anggaran ini terjadi di Kota Palopo. Bappeda mencatat, untuk Triwulan ketiga di 2020 ini, seluruh OPD di Kota Palopo baru mencapai angka rata-rata 55,87 persen atau Rp440.009.726.837. total APBD Palopo sendiri, untuk belanja langsung dan tidak langsung dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar Rp787.607.109.864.

Dari permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran

organisasi perangkat daerah di pemerintah kota palopo. Menurut (Rahmawati & Ishak, 2020) faktor yang mempengaruhi serapan anggaran yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa. Menurut (Gagola et al., 2017) faktor yang mempengaruhi serapan anggaran adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi.

Hasil penelitian (Oktaliza et al., 2020) perencanaan anggaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyerapan anggaran karena perencanaan anggaran memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan anggaran, begitupun dengan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Semakin baik komitmen manajemen, maka akan semakin baik pula tingkat penyerapan anggarannya. Menurut (Elim et al., 2018) pelaksanaan anggaran merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, dan proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran.

Untuk mencapai suatu kegiatan, semakin optimal penyerapan anggaran maka akan semakin banyak fasilitas umum dan pelayanan publik yang dapat dinikmati masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah harus lebih berkonsentrasi pada kegiatan yang lebih produktif untuk menghindari pengangguran uang daerah. Dalam hal ini,

peneliti menyoroti beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, antara lain perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan komitmen manajemen. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini ingin mengetahui apakah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan komitmen manajemen berpengaruh terhadap serapan anggaran organisasi perangkat daerah di pemerintah kota palopo.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Stewardship Teory

Menurut Donaldson et al (1991), teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh kepentingan-kepentingan individu melainkan lebih fokus dengan tujuan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Berdasarkan teori *stewardship*, prinsipal mengharapkan tanggung jawab bersama sesuai dengan kontribusi *steward*.

Dalam teori *stewardship*, terdapat suatu model yang didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif

atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani, model ini disebut dengan *model of man*. Pada teori *stewardship* terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan *pro-organisational*, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan *principal* dimana para *steward* berada. *Steward* akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif (Anton, 2010). Kesimpulannya, meskipun kepentingan antara *steward* dan *principal* berbeda, *steward* tetap akan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan.

Teori ini dapat dihubungkan dengan sektor publik karena pihak *steward* bertindak berdasarkan keinginan *Principal*. Maksudnya pihak pemerintah akan melakukan tugasnya sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan output yang maksimal ini akan memberikan tingkat kepuasan yang maksimal terhadap pihak *principal*. Dengan begitu *principal* akan menilai kinerja yang dilakukan oleh *Steward* sangat baik.

Implikasi *stewardship theory* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi organisasi perangkat daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan

fungsinya dengan tepat, membuat pertanggung jawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka manajemen (*stewards*) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

Serapan Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran yang telah disusun akan dievaluasi pada akhir tahun untuk melihat apakah estimasi kinerja tersebut telah tercapai. Pencapaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dalam bentuk kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan Bastian Indra (2006). Menurut Elim et al. (2018) anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Menurut Rahmawati & Ishak (2020) anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.

PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan

Dimana salah satu indikator dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah adalah penyerapan anggaran. Hal ini dikarenakan melalui tingkat penyerapan anggaran, dapat diketahui gambaran mengenai kinerja/kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan Mardiasmo (2009). Semakin optimal penyerapan anggaran untuk realisasi kegiatan, maka akan berdampak pada semakin banyak fasilitas umum dan pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam pemerintah daerah harus fokus pada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif sehingga tidak menimbulkan uang daerah yang menganggur BPKP (2011).

Menurut Rahmawati & Ishak (2020) faktor yang mempengaruhi serapan anggaran yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa. Menurut Gagola et al. (2017) faktor yang

mempengaruhi serapan anggaran adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi. Menurut penelitian Oktaliza et al. (2020) faktor yang mempengaruhi serapan anggaran adalah kualitas SDM (sumber daya manusia), regulasi, perencanaan anggaran, dan komitmen manajemen. Dan dari penelitian Elim et al. (2018) faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, diantaranya perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi. Berdasarkan penelitian terdahulu menyoroti beberapa faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi serapan anggaran yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan komitmen manajemen.

Menurut (Oktaliza et al., 2020) penyerapan anggaran yang baik dapat dilihat dari tingkat pelaksanaan realisasi fisik dan realisasi anggaran yang terjadwal sesuai dengan rencana kerja selama satu periode tahun anggaran. Menurut (Jumriani, 2018) Serapan anggaran dalam hal ini adalah kemampuan Pemda untuk merealisasikan sejumlah anggaran yang sudah ditetapkan bersama lembaga legislative (DPRD) didalam APBD yang dinyatakan dengan skala ordinal. Menurut Salwah (2019) penyerapan anggaran merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian. Dan menurut Ramdhani & Anisa (2017) penyerapan

anggaran yang akuntabel dan memenuhi prinsip value of money merupakan salah satu penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi ukuran kinerja pemerintah. Berdasarkan beberapa pendapat dari penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran adalah suatu kemampuan pemerintah dalam menjalankan rencana kerja dan mampu melakukan dan mempertanggungjawabkannya.

Perencanaan Anggaran

Secara umum, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan (*Planning*) dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurung waktu tertentu. Dalam UU No. 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dan perencanaan yang diatur dalam undang-undang no.25 tahun 2004 yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan

rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Untuk merealisasikan perencanaan dibutuhkan anggaran.

Beberapa pengertian perencanaan menurut para ahli berikut ini: Menurut Garth N.Jone, perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan pengembangan dari pada tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas. Menurut M.Farland, perencanaan adalah suatu fungsi dimana pimpinan kemungkinan menggunakan sebagian pengaruhnya untuk mengubah daripada wewenangnya. Menurut Abdulrachman (1973), perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat (*estimate*) sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian. Menurut Siagian (1994), perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.

Menurut Terry (1975), perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Menurut Kusmiadi (1995), perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana

cara pencapaiannya. Menurut Soekartawi (2000), perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia. Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan yaitu sebuah pemikiran yang dihasilkan lalu dikumpulkan untuk bisa merancang sebuah proses secara matang untuk mencapai target atau tujuan yang diinginkan kedepannya.

Pelaksanaan Anggaran

Dalam pemberian materi oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Prptomio Widodo (2018) mengatakan pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya manusia digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi bahwa anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap anggaran yang berwewenang dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung melihat masalah pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran yang baik adalah pelaksanaan yang tepat waktu, efektif dan efisien. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah antara lain: kepatuhan terhadap regulasi, kesesuaian atas perencanaan dan penganggaran, efisiensi pelaksanaan

kegiatan, serta efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Menurut Gagola et al. (2017) pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Dan proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan dalam internal satuan kerja, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Kedua hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran. Menurut Salwah (2019) pelaksanaan anggaran merupakan tahapan kegiatan yang dibuat oleh masing-masing pelaksanaan anggaran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan kegiatan, maka dengan dilaksanakannya pelaksanaan anggaran berarti bahwa program dan rencana operasional tahunan yang dapat dianggarkan akan mulai dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai aturan. Dalam penelitian Ramdhani & Anisa (2017) pelaksanaan anggaran merupakan upaya-upaya untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat. Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas yang dilaksanakan, yang terkait dengan penggunaan anggaran. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran yaitu proses selanjutnya yang akan dilakukan setelah menetapkan perencanaan anggaran dengan aturan yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakannya suatu program kegiatan. Dan dalam PP 71 Tahun 2010 penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan anggaran harus mengikuti prinsip-prinsip standar

akuntansi pemerintah (SAP) dimana menerapkan berbasis akrual. Laporan keuangan yang baik adalah yang disusun berdasarkan SAP.

Pengadaan Barang/Jasa

secara umum pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengadaan barang/jasa terbagi dua yaitu pengadaan barang/jasa pada sektor pemerintah dan non pemerintah. Pada sektor pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa berlangsung cukup sulit. Proses yang berlangsung harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tidak boleh melanggar peraturan sedikitpun. Menurut Keppres No.54, 2010 definisi pengadaan barang dan jasa adalah merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk mendapatkan barang dan jasa.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem

pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi *e-Procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan SPSE-LKPP untuk digunakan oleh layanan pengadaan secara elektronik di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Menurut Mulyono (2016) dengan adanya *e-procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin rendah, sehingga proses pengadaan dapat berlangsung lebih transparan, hemat waktu dan biaya serta mudah dalam pertanggungjawaban keuangannya. Secara umum, alur proses aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nasional, yaitu:

1. Persiapan lelang

Dalam persiapan lelang, terdapat kegiatan pembentukan ULP/Pejabat Pengadaan, pembuatan lelang, dan pengumuman lelang kepada rekanan melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional. Persiapan lelang melibatkan admin agency, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

2. Metode pemilihan, seleksi, dan evaluasi penyedia barang/jasa secara elektronik pada dasarnya sama dengan metode pelaksanaan lelang nonelektronik yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun pelaksanaannya dilakukan secara elektronik.

3. Metode penyampaian dokumen dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Metode e-lelang pascakualifikasi dengan satu file
 - b. Metode e-lelang pascakualifikasi dengan dua file
 - c. Metode e-lelang prakualifikasi dengan satu file
 - d. Metode e-lelang prakualifikasi dengan dua file.

Komitmen Manajemen

Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu Yanuariza et al. (2019). Apabila setiap pegawai memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan prestasi terbaik baik masyarakat, maka tentunya kinerja sektor publik akan meningkat Mahmudi dalam Yanuariza et al. (2019).

Pengertian komitmen manajemen/organisasi menurut para ahli yaitu: Menurut O'Reilly 1989 komitmen manajemen adalah sebagai ikatan kejiwaan seseorang terhadap organisasi yang mencakup keterlibatan kerja, kesetiaan dan perasaan percaya terhadap nilai-nilai organisasi. Menurut Mathins dan Jackshon (2000) pengertian komitmen organisasi adalah derajat dimana karyawan mempercayai dan menerima tujuan-tujuan organisasi serta tidak

akan meninggalkan organisasi tersebut. Pengertian komitmen organisasi menurut Luthans 2006 adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi dan keyakinan tertentu juga penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Menurut Allen dan Meyer pengertian komitmen organisasi adalah kelekatan emosi, identifikasi dan keterlibatan individu dengan organisasi serta keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Berdasarkan dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen manajemen/organisasi merupakan keterikatan kuat antara anggota organisasi dengan organisasi tersebut yang secara suka rela dalam mengikuti setiap kegiatan organisasi dan memiliki keinginan yang kuat dalam berusaha untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Allen dan Meyer dalam Oktavianti (2017) mengemukakan tiga komponen tentang komitmen organisasi:

1. *Affective Commitment*, terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional (*emotional attachment*) atau merasa mempunyai nilai sama dengan organisasi.
2. *Continuance Commitment*, yaitu kemauan individu untuk tetap bertahan dalam organisasi karena tidak menemukan pekerjaan lain atau karena rewards ekonomi tertentu.

3. *Normative Commitment*, timbul dari nilai-nilai karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena ada kesadaran bahwa berkomitmen terhadap organisasi merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan.

Hipotesis

Hipotesis atau tanggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ini masih dugaan sementara di penelitian ini. Adapun hipotesis penelitian ini adalah:

1. Diduga perencanaan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran organisasi perangkat daerah.
2. Diduga pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran organisasi perangkat daerah.
3. Diduga pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap serapan anggaran organisasi perangkat daerah.
4. Diduga komitmen manajemen berpengaruh terhadap serapan anggaran organisasi perangkat daerah.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal. Dimana pendekatan kausal ini adalah penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat

dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, dan Komitmen Manajemen sebagai variabel independen terhadap Serapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sebagai variabel dependen di Pemerintah Kota Palopo melalui penyebaran kuesioner.

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah pada Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dan Dinas Sosial pada Pemerintah Kota Palopo. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena berkaitan dengan subjek penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah, dengan waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama dua bulan.

Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono dalam Yanuariza et al, (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota Palopo. Sampel

penelitian adalah sebagian populasi yang di ambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dari populasi dengan berdasarkan kriteria yaitu 1. Bidang keuangan, 2. Pengambil keputusan, 3. Pengambil kebijakan. Jumlah organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Palopo yang menjadi sampel sebanyak 3 OPD dengan responden sebanyak 57 pegawai.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data tersebut berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden dan akan langsung di respon secara tertulis yang bekerja di organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan menjadi sampel penelitian yang ada di Pemerintah Kota Palopo. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara langsung dari melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Palopo. Data sekunder yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran (LRA) dari sampel yang akan diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan

cara menyebarkan kuesioner secara langsung oleh peneliti kepada responden dan dijawab langsung atas kuesioner yang diberikan kepada OPD Kota Palopo dan pengambilan data langsung berupa laporan realisasi anggaran yang menjadi sampel di BPKAD dan di tunggu selama dua minggu.

Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

variabel penelitian

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu variabel bebas (independen) dimana variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, dan variabel terikat (dependen) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan komitmen manajemen, dan variabel terikatnya adalah serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Palopo.

Definisi Operasional

Definisi operasional dari masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

1. variabel independen (X)

Adapun variabel independen (X) dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran organisasi perangkat daerah: (1) perencanaan anggaran, yaitu suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan

tersebut (2) pelaksanaan anggaran, adalah tahap dimana sumber daya manusia digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran (3) pengadaan barang dan jasa, merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa (4) komitmen manajemen, adalah karyawan menerima tujuan organisasi dan menerima serta kesediaan bekerja keras demi tercapai sebuah tujuan organisasi tersebut.

2. variabel dependen (Y)

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu serapan anggaran organisasi perangkat daerah di pemerintah Kota Palopo. Serapan anggaran adalah selisih antara jumlah anggaran yang ditetapkan dengan anggaran yang terealisasi menunjukkan besarnya varian anggaran (*budget vatiances*). Semakin kecil varian anggaran, maka semakin besar serapan anggaran dan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menunjukkan pertanyaan kemudian di jawab oleh responden secara tertulis untuk memperoleh informasi dimana pada pengukurannya menggunakan skala likert. Data mengenai serangkaian pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi serapan

anggaran organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Palopo.

Skala pengukuran untuk mengukur variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Pertanyaan dalam skala likert akan diisi oleh responden dalam jumlah kategori tertentu, sebagai berikut.

1. Sangat Setuju diberi skor 5
2. Setuju diberi skor 4
3. Kurang setuju diberi skor 3
4. Tidak Setuju diberi skor 2
5. Sangat Tidak Setuju diberi skor 1

Instrumen penelitian yang lainnya yaitu setiap pertanyaan mengandung indikator sesuai dengan variabel yang digunakan. Instrumen penelitian harus memiliki pertanyaan yang valid dan reliabel.

Analisis Data

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, suatu koesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan yang ada pada koesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut. Di dalam penelitian ini pengujian validitas akan dilakukan dengan menggunakan *Pearson correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang telah diperoleh dari sejumlah pertanyaan-pertanyaan, apabila Sig.(2-tailed) yang dapat memiliki nilai dibawah 0,05 artinya bahwa data yang telah diperoleh adalah valid (Ghozali, 2009).

Uji Reliabilitas

Dalam uji reliabilitas mampu menunjukkan konsistensi dari data-data yang telah dikumpulkan, suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban dari pertanyaan seseorang konsisten dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu (Ghozali, 2009), uji reliabilitas ini hanya akan dilakukan setelah suatu instrument telah dipastikan validitasnya. Cara mengukur reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran yang dilakukan hanya sekali dan setelah itu hasilnya di bandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Kriteria dari pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian *Cronbach Alpha* > 0,60 Nunnaly, 1960 dalam (Ghozali, 2009).

Metode Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan yang menyoroti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Adapun metode analisis regresi linear berganda dengan formulasi matematis sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

Y = serapan anggaran organisasi perangkat daerah

a = konstanta

b_{1x1} = koefisien regresi perencanaan anggaran

b_{2x2} = koefisien regresi pelaksanaan anggaran

b_{3x3} = koefisien regresi pengadaan barang dan jasa

b_{4x4} = koefisien regresi komitmen manajemen

e = error

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Menurut priyatno (2009) jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus dipenuhi yaitu data berasal dari distribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal Ghozali (2016). Adapun uji normalitas di dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas *one-sample Kolmogorov-Smirnov test* dengan bantuan SPSS. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordina, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak terdistribusi normal, atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik nonparametrik.

Uji Multikolenieritas

Uji asumsi klasik digunakan pada persamaan model regresi sehingga data-data yang digunakan dalam pengujian hipotesis bebas dari asumsi klasik. Uji multikolenieritas menurut Priyatno (2009) multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi (model persamaan regresi). Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen Ghozali Imam (2016). Untuk nilai *cutoff* yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah *variance inflation factor* (VIF) > 0,1. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya:

1. Dengan melihat nilai *inflation faktor* (VIF) pada model regresi,
2. Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R²),
3. Dengan melihat nilai *eigenvalue* dan *condition index*.

Tetapi dalam penulisan kali ini akan dilakukan uji multikolinieritas dengan melihat nilai *inflation faktor* (VIF) pada model regresi. Adapun uji multikolinieritas di dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.

Uji Hipotesis

Uji T

Uji t (uji parsial) pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi secara parsial dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Untuk menentukan nilai t tabel ditentukan dengan tingkat signifikan 5%. Kriteria pengujian yang digunakan, yaitu : p-value < 0,05, maka H_a ditolak.

Uji F

Uji F (uji simultan) pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F tabel, tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5%. Kriteria pengujian yang digunakan, yaitu: jika p-value > 0,05, maka H_a ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Responden di penelitian ini

merupakan pegawai negeri dalam bidang keuangan yang bekerja di Dinas Pemerintahan Kota Palopo yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dan Dinas Sosial. Dimana peneliti mendapatkan data dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan ke seluruh pegawai negeri bidang keuangan pada dinas tersebut sebanyak 62 kuesioner dengan jumlah kuesioner yang dikembalikan dan diisi sebanyak 57 kuesioner atau sebesar 92%.

Hasil Penelitian Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas dapat dinyatakan bahwa seluruh pernyataan tentang perencanaan

anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), pengadaan barang/jasa (X3), komitmen manajemen (X4) dan serapan anggaran (Y) dinyatakan valid karena nilai *pearson correlation r* hitung > *r* tabel itu sendiri.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabel dapat dinyatakan bahwa hasil dari alpha cronbach's seluruh variabel menunjukkan > 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner penelitian dapat di percaya sebagai alat ukur dalam menjelaskan variabel Perencanaan Anggaran (X1), Pelaksanaan Anggaran (X2), Pengadaan Barang/Jasa (X3), Komitmen Manajemen (X4) Dan Serapan Anggaran (Y).

Analisi Data

Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.420	1.540		2.220	.031		
Perencanaan anggaran	.718	.082	1.178	8.729	.000	.176	5.689
Pelaksanaan anggaran	-.700	.108	-.693	-6.498	.000	.282	3.552
Pengadaan barang/jasa	.183	.092	.233	1.994	.051	.234	4.277
Komitmen manajemen	-.080	.073	-.121	-1.091	.280	.259	3.858

a. Dependent Variable: Serapan anggaran

Sumber data: diolah di SPSS 2021

Dari tabel hasil analisis regresi berganda di atas, diperoleh koefisien variabel bebas perencanaan anggaran (X1) sebesar 0,718, koefisien variabel bebas pelaksanaan anggaran (X2) sebesar -0,700, koefisien variabel

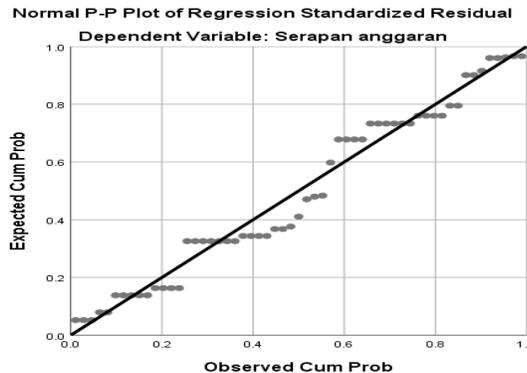
bebas pengadaan barang/jasa (X3) adalah sebesar 0,183 dan koefisien variabel bebas komitmen manajemen (X4) adalah sebesar -0,080. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = a + b_1X_1 - b_2X_2 + b_3X_3 - b_4X_4 + e$$

$$Y = 3,420 + 0,718 (X_2) - 0,700 (X_2) + 0,183 (X_3) - 0,080 (X_4) + e$$

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.4 di bawah pada grafik plot menunjukkan titik-titik mengikuti garis diagonalnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.



Sumber data: diolah di SPSS (2021)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		57	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.72059703	
Most Extreme Differences	Absolute	.119	
	Positive	.119	
	Negative	-.105	
Test Statistic		.119	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.042 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.373 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.360
		Upper Bound	.385
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber data: diolah di SPSS (2021)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov dengan pendekatan Monte Carlo

menunjukkan nilai signifikan 0,373 > 0,05, maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal karena nilai

p-value yang didapat lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.420	1.540		2.220	.031		
Perencanaan anggaran	.718	.082	1.178	8.729	.000	.176	5.689
Pelaksanaan anggaran	-.700	.108	-.693	-6.498	.000	.282	3.552
Pengadaan barang/jasa	.183	.092	.233	1.994	.051	.234	4.277
Komitmen manajemen	-.080	.073	-.121	-1.091	.280	.259	3.858

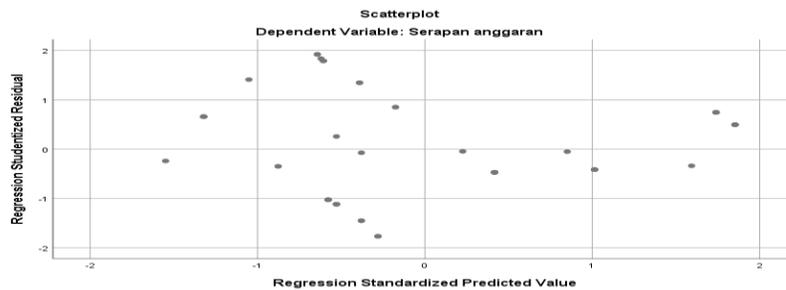
a. Dependent Variable: Serapan anggaran

Sumber data: diolah di SPSS 2021

Selain itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini adalah perencanaan anggaran sebesar 5.689, pelaksanaan anggaran sebesar 3.522, pengadaan barang/jasa sebesar 4.277 dan komitmen manajemen sebesar 3.858. Oleh karena itu, nilai tersebut juga

telah memenuhi syarat lainnya dari uji multikolonieritas ini bahwa nilai dari VIF harus $> 0,1$. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber data: diolah di SPSS

Dari hasil uji yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki heteroskedastisitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya titik-titik yang tersebar secara acak pada sumbu

Y dan diatas maupun dibawah angka 0.

Uji Hipotesis

Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.420	1.540		2.220	.031
	Perencanaan anggaran	.718	.082	1.178	8.729	.000
	Pelaksanaan anggaran	-.700	.108	-.693	-6.498	.000
	Pengadaan barang/jasa	.183	.092	.233	1.994	.051
	Komitmen manajemen	-.080	.073	-.121	-1.091	.280

a. Dependent Variable: Serapan anggaran

Sumber data: diolah di SPSS 2021

Berdasarkan hasil uji parsial terlihat bahwa hanya perencanaan anggaran sebesar 0,000, pelaksanaan anggaran sebesar 0,000, dan pengadaan barang/jasa sebesar 0,051

yang berpengaruh terhadap serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah dimana nilai signifikan < 0,05.

Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	145.588	4	36.397	65.087	.000 ^b
	Residual	29.079	52	.559		
	Total	174.667	56			

a. Dependent Variable: Serapan anggaran

b. Predictors: (Constant), Komitmen manajemen, Perencanaan anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pengadaan barang/jasa

Sumber data: diolah di SPSS 2021

Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk X1, X2, X3 dan X4 berpengaruh secara simultan terhadap Y yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $65,087 > 2,54$ (F tabel). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan

diterima dimana terdapat pengaruh antara variabel X1, X2, X3 dan X4 terhadap variabel Y.

Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial

Tahun	Dinas Sosial		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Serapan anggaran
2016	5.158.340.300,00	5.168.791.717,00	100,20 %

2017	7.658.622.340,00	7.446.290.971,00	97,23 %
2018	7.125.383.522,00	7.035.333.178,00	98,74 %
2019	9.607.702.400,00	9.535.904.205,00	99,25 %
2020	5.830.302.298,00	5.738.176.988,00	99,82 %
Rata-rata	7.076.070.172,00	6.984.899.411,600	99,04 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial (2021)

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dinas Sosial yang didapatkan dari BPKAD Kota Palopo terlihat dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020, secara keseluruhan penyerapan anggaran telah terserap sebesar 99,04% hal ini berarti bahwa serapan anggaran pada Dinas Sosial telah baik dalam penyerapan anggaran karna hampir mencapai 100%. Di tahun 2016 tingkat serapan anggaran

telah mencapai 100,20% hal ini berarti di tahun tersebut tingkat serapan anggaran tinggi, dan di tahun 2017-2020 terlihat bahwa tingkat serapan anggaran hampir mencapai dari 100% dan ini terlihat bahwa serapan anggaran telah terserap dengan baik karena hampir mendekati dari 100%.

Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah

Tahun	Badan Pendapatan Daerah		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Serapan Anggaran
2017	19.623.342.900,00	17.216.904.435,00	87,74 %
2018	20.947.436.663,00	18.412.113.329,00	87,90 %
2019	26.128.735.000,00	27.207.576.518,02	104,13 %
2020	26.168.679.970,00	27.575.840.022,00	104,20%
Rata-rata	23.217.048.633,00	22.603.108.576,02	95,99 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BAPENDA (2021)

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah yang didapatkan dari BPKAD Kota Palopo terlihat dalam empat tahun terakhir dari tahun 2017-2020 secara keseluruhan penyerapan anggaran terserap sebesar 95,99%, hal ini berarti bahwa tingkat serapan anggaran pada Badan Pendapatan Daerah telah baik karena telah hampir mendekati dari 100%. Di tahun 2017 dan 2018 tingkat

serapan anggaran masih rendah yang hanya terserap sebesar 87,74% dan 87,90% , tetapi di tahun 2019-2020 terlihat bahwa tingkat serapan anggaran tinggi. Hal ini ini membuktikan terjadi peningkatan serapan anggaran di badan pendapatan daerah di tahun 2019-2020.

Laporan Realisasi Anggaran BPKAD

Tahun	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Serapan anggaran
2016	932.533.109.306,00	883.230.853.889,27	94,71 %
2017	767.731.258.952,00	748.923.385.418,47	97,55 %
2018	801.033.760.283,00	782.162.444.145,29	97,64 %
2019	812.459.359.961,00	800.672.077.528,66	98,55 %
2020	769.513.792.565,00	771.959.387.471,98	100,02 %
Rata-rata	796.654.056.213,00	797.389.624.291,77	97,89 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKAD (2021)

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo terlihat dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 dari nilai rata-rata penyerapan anggaran telah terserap sebesar 97,89%, hal ini berarti serapan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah tinggi dimana hampir mencapai 100%. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakannya. Dan tingkat serapan anggaran dari tahun 2016-2020 tingkat penyerapannya baik dari tahun ke tahun, dan membuktikan bahwa serapan anggaran terserap dengan baik dan meningkat setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan dalam penyerapan anggaran tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan komitmen manajemen terhadap serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (studi pada Pemerintah Kota Palopo), maka dapat disimpulkan bahwa:

- Perencanaan anggaran dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka secara parsial perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah, sehingga hipotesis pertama dinyatakan .
- Pelaksanaan anggaran dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka secara parsial pelaksanaan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap serapan anggaran

- Organisasi Perangkat Daerah, sehingga hipotesis kedua dinyatakan diterima.
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai t hitung sebesar 1,994 dan t tabel sebesar 1,672, maka secara parsial pengadaan barang/jasa berpengaruh secara signifikan terhadap serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah, dimana nilai t hitung lebih besar dari t tabel itu sendiri sehingga hipotesis ketiga dinyatakan diterima.
 - d. komitmen manajemen memiliki nilai signifikan sebesar 0,280 dimana lebih besar dari 0,05. Dengan nilai t hitung sebesar -1,091 dan nilai t tabel sebesar 1,672 dimana nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, maka secara parsial komitmen manajemen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah, sehingga hipotesis keempat dinyatakan ditolak.

Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka penulis memberikan saran antara lain:

- a. Pemerintah daerah Kota Palopo dalam upaya untuk meningkatkan penyerapan anggaran diharapkan dapat memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan penyerapan anggaran, dengan cara terus memperbaiki proses perencanaan anggaran, mempercepat proses pelaksanaan anggaran, melakukan proses pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan perundang-

- undangan yang berlaku. Meningkatkan komitmen manajemen dengan cara mendukung pelatihan/bimbingan teknis bagi para pegawai.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya yang memiliki topik dan tema yang sama. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan melaksanakan penelitian dengan responden yang lebih luas agar penelitian dapat digunakan secara universal. Serta diharapkan menambah variabel penelitian, agar dapat diketahui adanya variabel lain yang mempengaruhi Serapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, F. X. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen.
- Bastian Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- BPKP. (2011). *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Paris Review.
- Elim, M. A., Ndaparoka, D. S., & Tomasowa, T. E. D. (2018). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Audit*, 3(2), 46–56.
<http://jurnal.pnk.ac.id/index.php/jaka/article/view/310/196>
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan,

- J. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 108–117.
<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330>
- Ghozali. (2009). Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program SPSS (IV). UNDIP.
- Handayani, cut wuri. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Skpd Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2015 Dengan Silpa Sebagai Variabel Moderating. Simposium Nasional AKuntansi XX, September, 1–19.
- Jumriani, J. (2018). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 11.
<https://doi.org/10.31850/economos.v1i3.563>
- Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. (2018). Pentingnya Pelaksanaan Anggaran yang Tepat Waktu, Efektif dan Efisien. Bpsdm.Pu.Go.Id.
<https://bpsdm.pu.go.id/bacaberita-pentingnya-pelaksanaan-anggaran-yang-tepat-waktu-efektif-dan-efisien>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Menkumham Yasonna H. Laoly. (2019). *PP 12 TAHUN 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah*. Jogloabang.Com.
<https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-12-2019-pengelolaan-keuangan-daerah>
- Menteri Keuangan Sri Mulyani. (2020). Sri Mulyani Soroti Lambatnya Serapan Anggaran Pemerintah Daerah. Money.Kompas.Com.
<https://money.kompas.com/read/2020/12/01/190000526/sri-mulyani-soroti-lambatnya-serapan-anggaran-pemerintah-daerah->
- Mulyono, P. E. (2016). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik. 4, 32–42.
- Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. 1(April).
- Oktavianti, L. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Dan Ketersediaan Infrastruktur Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180–189.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran , Kualitas Sumber Daya Manusia

- Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *10*(1), 134–148.
- Rifai, A., Inapty, B. A., & Pancawati M., R. S. (2016). Analisis Faktor–Faktor Yang Memengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Pemprov NTB). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1–10.
<https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i01.p01>
- Salwah, A. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, *09*(November 2019), 164–182.
- Yanuariza, Hasan, A., & M.Rasuli. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran , Pencatatan Administrasi , Sumberdaya Manusia , Komitmen Organisasi dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran PNBK Kegiatan Pengamanan Objek Vital pada Satker Jajaran Polda Riau. *Ekonomi*, *27*(4), 409–423.